



**DOKUMEN
RENCANA KERJA PENETAPAN
(RENJA)
SEKRETARIAT DPRD
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN

Jl. Mataram No. 3 Pekalongan 51111

Telepon (0285) 421984 email : setwan@pekalongankota.go.id



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 000.7.2.4/ 08 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun sekaligus merupakan komitmen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – kota Besar dan Kota – kota

Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

Pasal 1

- (1) Dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021-2026.

Pasal 2

Sistematika RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, meliputi :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal Juli 2024
Sekretaris DPRD Kota Pekalongan



WIDARJANTO, SH, M.HuM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660424 199603 1 002

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Sekretariat DPRD Kota Pekalongan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Pekalongan, 8 Agustus 2024



SEKRETARIS DPRD KOTA PEKALONGAN

WIDARJANTO, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19660424 199603 1 002

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	2
	1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel.C.29)	11
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel.T- C.30)	15
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31) .	22
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel.T-C.32) .	22
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025	24
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 (Tabel.T-C.33)	24
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V.	PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

1. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) Kota Pekalongan 12
2. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Daerah Kota Pekalongan 12
3. Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Pekalongan.
4. Tabel T-C.32 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pekalongan.
5. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pekalongan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Resntra Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Renja Perangkat Daerah/RKT merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja disyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kedudukan Renja Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD berpedoman pada renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di tahun yang akan datang, maka perlu segera menetapkan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Pekalongan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan pada akhir tahun anggaran. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan lembaga Unsur Organisasi Pemerintah Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Palembang sehingga tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025, adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program/kegiatan dan kebijakan anggaran tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Sekretariat DPRD, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Tahun 2025;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
5. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip **Good Governance dan Clean Government**

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan
- 3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berdasarkan pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan yang disajikan dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan, maka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, dilakukan evaluasi dan analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja kegiatan, agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dalam rangka perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 terlampir pada tabel berikut :

Berdasarkan Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 Kota Pekalongan, bahwa tingkat pencapaian kinerja setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023, sebagai berikut :

I. Kesimpulan Capaian Berdasarkan Aspek Indikator Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) indikator program sebagai berikut:
 - a. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja
 - b. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - c. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah
 - d. Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD

Tujuan strategis 4 (empat) indikator tersebut adalah meningkatnya layanan masyarakat dan akuntabilitas kinerja. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan sasaran strategis dan IKU dari keempat indikator tersebut adalah Nilai SAKIP OPD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 5 (lima) indikator program sebagai berikut:
 - a. Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan
 - b. Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - c. Persentase Ketercapaian Peningkatan Kapasitas DPRD
 - d. Persentase Ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - e. Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Tugas DPRD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

Analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yang menunjukkan peran utama dan kontribusi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam mendukung tercapainya Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius”**.

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi, serta penentuan penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis capaian kinerja setiap sasaran kinerja, berikut gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output dapat dilihat pada Tabel. T-C.30 berikut :

	Persentase ketercapaian penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasi
	Persentase ketercapaian pelaksanaan tugas DPRD	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasi

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Berdasarkan Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, realisasi capaian kinerja Tahun 2023 sebagian besar dalam skala diatas 95% dengan kategori sangat tinggi / sangat berhasil.

Ketercapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tercapai sangat tinggi / sangat berhasil disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

- a. Perencanaan anggaran disusun dengan lebih baik sehingga terjadi peningkatan realisasi kinerja.
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan tepat waktu

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;

2. Perlunya manajemen resiko dalam menghadapi kemungkinan penanganan masalah yang timbul akibat ketidakpahaman publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah;
3. Penguatan regulasi dan perbaikan celah-celah regulasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat memperkuat proses perencanaan dan pembinaan yang semakin mengedepankan asas value for money;
4. Maturitas organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah belum diimbangi dengan bertambahnya tingkat layanan terstandar pada unit penunjang teknologi informasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat;
5. Perlunya optimalisasi pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Pekalongan;
6. Mengoptimalkan koordinasi dan pelayanan dalam semua pelaksanaan kegiatan;
7. Peningkatan pelayanan Sistem Informasi Peminjaman Ruang Rapat Paripurna agar dapat diakses oleh semua OPD dan masyarakat dengan baik;
8. Optimalisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
9. Perlu digitalisasi register surat dinas di Sekretariat DPRD.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPД

Review terhadap Rancangan Akhir RKPД Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target capaian / tolok ukur, dan besaran dana / pagu yang dibutuhkan, review rancangan akhir RKPД terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPД tahun 2025 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

No	Rancangan Akhir RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp .000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp .000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian , adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 2. Persentase ketersediaan layanan adm keuangan dan	100% 100%	35.903.924	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 2. Persentase ketersediaan layanan keuangan dan	100% 100%	34.511.800	

			kesejahteraan DPRD 3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah 4. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100% 100%				kesejahteraan DPRD 3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah 4. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100% 100%		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu 2. Persentase perda yang ditetapkan	100% 100%	28.892.418	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu Persentase perda yang ditetapkan	100% 100%	27.207.112	

Dari hasil reviu rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat kota Pekalongan diperoleh kesimpulan : Rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 telah disusun dengan asistensi dan koordinasi dengan Bappeda Kota Pekalongan dan secara garis besar telah selaras dengan renstra dan RKPD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025. Namun demikian masih terdapat kekurangan sebagai berikut :

1. Sampai dengan berakhirnya reviu, belum ada SK Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan bukti dokumentasi rapat-rapat internal terkait penyusunan Renja;
2. Belum ada dokumen Rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025;
3. Rancangan akhir Renja belum disajikan dengan sistematika sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
4. Sekretariat DPRD Kota Pekalongan belum menyampaikan dokumen rncangan akhir Renja secara lengkap kepada Bappeda untuk ditetapkan menjadi Perkada;
5. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan renstra :
 - a. Ketidaksesuaian indicator kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - b. Ketidaksesuaian indicator dan target kinerja kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
6. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan RKPD Tahun Anggaran 2025:
 - a. ketidaksesuaian Indikator Kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. ketidaksesuaian rumusan Sub Kegiatan beserta indicator dan target kerjanya, yaitu sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (ada dalam Renja, namun tidak ada dalam RKPD).

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kota Pekalongan. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

Tabel T.C-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kota Pekalongan, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Prioritas daerah
6	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	7.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2025 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk Tahun 2025 agar, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Setiap Perangkat Daerah bersama-sama melakukan optimalisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota Pekalongan Periode Tahun 2021-2026, oleh karena itu Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mengadopsi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius”.

Sedangkan Misi yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, adalah Misi Ke-7 Pemerintah Kota Pekalongan yaitu :“**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan prinsip prinsip Good Governance dan Clean Government**”.

3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Pekalongan harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kota Pekalongan dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja 2025 ini terbagi dalam 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 sebesar Rp. 61.718.912.000,00 (Enam puluh satu milyar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Pekalongan.

Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan akhir RKPD 2025 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - g. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

- h. Layanan Administrasi DPRD
 - 1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- 2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 2) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 1) Pembahasan KUA dan PPAS
 - 2) Pembahasan APBD
 - 3) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - c. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 1) Pendalaman Tugas DPRD
 - 2) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - 3) Penyusunan Program Kerja DPRD
 - 4) Publikasi dan Dokumentasi DPRD
 - d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - 2) Pelaksanaan Reses
 - e. Fasilitasi Tugas DPRD
 - 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

3.3.3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD. Berdasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025

4.1. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Kedua Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						61.718.912.000,00							48.388.190.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						61.718.912.000,00							48.388.190.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						61.718.912.000,00							48.388.190.000,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	34.511.800.000,00						-	28.908.364.000,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	20.064.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat	-	16.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	100 persen	100 persen	100 persen	3 Dokumen	3.306.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	2 Dokumen	1.558.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 persen	100 persen	100 persen	15 Laporan	15.200.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		8.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.227.585.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD	-	3.328.071.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	100 persen	100 persen	100 persen	25 Orang/bulan	3.163.841.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD		3.256.171.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	12 Dokumen	62.300.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD		70.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	1 Laporan	1.444.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD		1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.000.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 persen	100 persen	100 persen	1 Paket	5.000.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.689.605.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	2.710.411.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	4 Paket	19.131.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	4 Paket	516.517.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		255.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	4 Paket	6.000.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	100 persen	100 persen	100 persen	4 Paket	714.772.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		627.911.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	100 persen	100 persen	100 persen	13 Paket	32.235.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		142.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	100 persen	100 persen	100 persen	2 Dokumen	25.800.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	100 persen	100 persen	100 persen	12 Laporan	379.250.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	450 Laporan	1.995.900.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.244.025.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	940.937.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			<i>Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat</i>	100 persen	100 persen	100 persen	4 Laporan	1.800.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		1.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	100 persen	100 persen	100 persen	12 Laporan	276.252.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	100 persen	100 persen	100 persen	12 Laporan	965.973.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		739.137.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	893.823.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	1.431.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	100 persen	100 persen	100 persen	23 Unit	550.723.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		911.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	100 persen	100 persen	100 persen	2 Unit	250.000.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	100 persen	100 persen	100 persen	143 Unit	93.100.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<i>persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	24.595.218.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat	-	19.471.305.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	35 Orang/Bulan	23.704.121.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		18.541.305.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>	100 persen	100 persen	100 persen	140 Paket	335.725.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	35 Orang	555.372.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	836.480.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat	-	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	12 Laporan	386.480.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD															
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>	100 persen	100 persen	100 persen	12 Paket	450.000.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase Perda yang ditetapkan</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100,00 persen	27.207.112.000,00						-	19.479.826.000,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Persentase ketercapaian pembentukan Perda dan peraturan DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	4.692.620.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	-	8.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	100 persen	100 persen	100 persen	12 Dokumen	2.772.250.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan															
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>	100 persen	100 persen	100 persen	6 Dokumen	1.920.370.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		5.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	302.850.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	409.197.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS															

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>	100 persen	100 persen	100 persen	2 Dokumen	149.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	2 Dokumen	149.200.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	1 Dokumen	4.450.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		109.197.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase Ketercapaian peningkatan kapasitas DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.324.597.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		3.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	4 Dokumen	1.442.100.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	100 persen	100 persen	100 persen	20 Dokumen	217.340.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
--	--	--	---	------------	------------	------------	------------	----------------	--	--------------------------------------	---	--	-------------	--	----------------	------------------

4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
		<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	1 Dokumen	64.600.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
		<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	48 Dokumen	600.557.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Persentase ketercapaian penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.165.715.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	-	1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
		<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	12 Laporan	259.665.000,00	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	100 persen	100 persen	100 persen	3 Dokumen	906.050.000,00	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		1.400.000.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Persentase Ketercapaian Fasilitasi tugas DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100,00 persen	18.721.330.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	5.920.629.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
		<i>Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	100 persen	100 persen	100 persen	1 dokumen	18.721.330.000,00	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		5.920.629.000,00	SEKRETARIAT DPRD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2025.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
SEKRETARIS DPRD KOTA PEKALONGAN

WIDARJANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda

